

Tugas Politik & Pemerintahan Jepang
Dominasi *Liberal Democratic Party* di Jepang



Penyusun

Anggun Dwi Panorama	20120510295
Raditia Sapta Candra	20120510
Nanda Putri P.	20120510304
Muhammad Iqbal Rumodar	20120510314
Esi Indraswari	20120510319

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

A. Pendahuluan

Sejak kedaulatan Jepang dikembalikan oleh SCAP pada tahun 1952, Jepang mulai menerapkan konstitusi yang baru yaitu Konstitusi Jepang 1947. Dalam konstitusi Jepang 1947, Jepang melaksanakan demokrasi dengan adanya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk memilih anggota Diet. Anggota Diet, terutama di *House of Representative* terdiri dari warga sipil yang tergabung dalam berbagai partai politik di Jepang yang terpilih melalui pemilu tersebut.

Sistem pemilu yang diterapkan pada masa (1955) ini adalah *single non-transferable vote* (SNTV) di mana, di setiap distrik partai politik diharuskan untuk mencalonkan lebih dari satu kandidat. Kebijakan ini dimaksudkan agar pemilu lebih berfokus pada individu-individu dan bukan pada partai politik. Semenjak diterapkannya kebijakan ini, *Liberal Democratic Party (LDP)* menjadi partai yang dominan karena anggota-anggota partai yang terkenal dikalangan masyarakat Jepang.¹ Sekitar hampir empat dekade LDP berhasil mendominasi pemerintahan Jepang. Namun di tahun 1993, koalisi partai oposisi hanya berhasil memperoleh sebagian besar dari total suara dan LDP yang biasanya dominasi dihentikan oleh koalisi partai-partai yang menjadi oposisinya meskipun LDP tetap memperoleh suara yang cukup banyak.²

Pada tahun 1993, pemerintah Jepang melakukan amandemen mengenai sistem pemilu 1955. Sistem pemilu yang semula individu-sentris diubah menjadi partai-sentris.³ Dari hal ini, bisa ditebak bahwa kebijakan ini mencegah dominasi LDP dalam pemerintahan Jepang. Kemudian pada tahun 2009 LDP kalah dari *Democratic Party of Japan (DPJ)*. Pada pemilu tahun 2012, LDP mulai kembali memperoleh suara dari masyarakat Jepang.⁴

Bila diperhatikan, LDP terus mendapat dukungan yang besar dari masyarakat Jepang dan hanya pada periode yang sebentar saja kehilangan dukungan dari masyarakat lalu berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dan dukungan dari masyarakat Jepang.

B. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan pemilu, LDP selalu menjadi Partai yang populer di kalangan masyarakat Jepang. Selain itu, anggota *House of representative* dalam Diet juga didominasi oleh kader dari LDP dan kebanyakan Perdana Menteri Jepang berasal dari LDP.

Mengapa LDP bisa sangat populer sehingga mampu mendominasi pemerintahan di Jepang ?

C. Pembahasan

Kondisi Pemerintahan Jepang

1 Ho Kong-lim. 印尼語作文 : PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM DI JEPANG. 2012

2 KRAUSS, ELLIS S. AND ROBERT J. PEKKANEN : *The Rise and Fall of Japans Liberal Democratic Party*

3 Gallagher, Michael & Paul Mitchell, *The Politics of Electoral System*. (Oxford: Oxford University Press, 2005)

4 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8229368.stm>

Sejak berhentinya PM Shinzo Abe pada tahun 2007, posisi Perdana Menteri di Jepang terus berubah-ubah. Setelah PM Shinzo Abe dari jabatannya, ada lima kali pergantian Perdana Menteri Jepang. Dan pada tahun 2012 lalu Shinzo Abe terpilih lagi menjadi Perdana Menteri Jepang dan telah menjabat dari tahun 2012 sampai dengan sekarang (tahun 2014).

Pada tahun 2009 partai penguasa di Jepang telah berganti, dari LDP (Liberal Democratic Party) yang terus berkuasa selama lebih dari 50 tahun, dipatahkan oleh DPJ (Democratic Party of Japan). peralihan kepercayaan masyarakat kepada partai oposisi Minshuto (Democratic Party of Japan). Janji politik-lah yang pada mulanya membawa rakyat beralih ke DPJ, dengan kekalahan telak pertama LDP pada pemilu 2009. DPJ meraih kekuasaan pada masa PM Yukio Hatoyama tahun 2009 setelah memenangi pemilu. DPJ kemudian menjadi salah satu kekuatan baru di ranah perpolitikan Jepang. Dalam rentan waktu 2009-2012, 3 Perdana Menteri terakhir adalah anggota dari DPJ, yaitu Yukio Hatoyama, Naoto Kan, dan Yoshihiko Noda.⁵

Pergantian Perdana Menteri Jepang menuntut Presiden *Liberal Democratic Party* (LDP), Sadakazu Tanigaki, untuk mengadakan perombakan di jajaran eksekutif partainya. Pada 30 September 2011, Sadakazu Tanigaki mengumumkan pergantian tersebut. *Reshuffle* ini diharapkan dapat memperkuat struktur LDP sehingga dapat memenangkan LDP di pemilu selanjutnya.⁶

Sejarah Liberal Democratic Party

Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke II, Jepang mengalami proses demokratisasi yang cukup pesat. Pengalaman Jepang dengan sistem kepartaian sebelum Perang Dunia ke II, membuat Jepang tidak kesulitan menjalankan sistem demokrasi parlementer pasca Perang Dunia ke II.

5 Dine Chandra Devi, *Menghitung Mundur, Politik Pemerintahan Jepang Lima Tahun Terakhir*, 2011. Diakses dari <http://polpemjepang2011.wordpress.com/2011/10/page/4/> pada tanggal 30 November 2014

6 Annisa Aryati, *Reshuffle di Tubuh Liberal Democratic Party Jepang*, 2011. Diakses dari <http://polpemjepang2011.wordpress.com/2011/10/page/4/> pada tanggal 30 November 2014

Pada bulan Agustus 1945, Partai Liberal dibentuk di bawah kepemimpinan Ichiro Hatoyama. Sejumlah partai politik lainnya dengan platform kebijakan yang beragam segera muncul setelah itu, termasuk Partai Sosialis Jepang (Nihon Shakai-to), Partai Progresif Jepang (Nihon Shimpō-to), Partai Kooperasi Jepang (Nihon Kyōdō-to), dan Partai Komunis Jepang (Nihon Kyōsan-to).

Partai Kooperasi Jepang bergabung dengan beberapa partai kecil Mei 1946 untuk membentuk Partai Kooperasi Demokrat (Kyōdō Minshu-to), yang bergabung dengan Partai Rakyat (Kokumin-to) pada bulan Maret 1947 untuk mendirikan Partai Kooperasi Rakyat (Kokumin Kyōdō -untuk). Pada bulan yang sama, Partai Progresif Jepang menjadi Partai Demokrat Jepang (Nihon Minshu-to) dan kemudian bergabung dengan Partai Kooperasi Rakyat untuk membentuk Partai Demokratik Rakyat (Kokumin Minshu-to). Sesaat sebelum Jepang kembali kemerdekaannya, partai ini dibubarkan pada bulan Februari 1952 dan dengan cepat membentuk partai baru, Partai Reformasi (Kaishin-to), yang berkembang menjadi Partai Demokrat Jepang (Nihon Minshu-to) pada bulan November 1954.

Kemudian pada 15 November 1955 Liberal Democratic Party atau Jiyū Minshu Tō (lebih populer disebut LDP) terbentuk. Sebagai gabungan dua partai oposisi, Partai Liberal (Jiyū Tō) yang dipimpin oleh Shigeru Yoshida dan Partai Demokrat Jepang (Minshu Tō) yang dipimpin oleh Ichiro Hatoyama. Keduanya merupakan partai konservatif sayap kanan yang melawan Partai Sosialis Jepang (Shakai Tō, Japan Socialist Party, yang pada akhirnya berganti nama dengan the *Social-Democratic Party/SDP*).

Dengan demikian secara jelas dapat disimpulkan bahwa pembentukan LDP merupakan reaksi dari pembentukan JSP. Hal tersebut mengingat LDP sendiri dibentuk pada bulan November 1955, satu bulan setelah terbentuknya JSP.

Pada kenyataan memang tidak hanya terdapat satu alasan terbentuknya LDP. Masaharu Kohno, dalam bukunya “Japan’s Postwar Party Politic”⁷ menyatakan:

“The creation of the LDP has been interpreted as a product of basic demand within the Japanese society that transcended the accumulated mistrust between the long-standing rival parties, the Liberal and the Democrats. However, although the socio-ideological factors may have been at work, such factors alone cannot account for the details of the actual process by which the LDP was ceated”.

Dalam bukunya tersebut, ditambahkan pula bahwa faktor yang lain yang mendukung terbentuknya LDP adalah dorongan dari pelaku bisnis di Jepang. Pelaku bisnis berperan besar dalam mendorong dan sebagai mediasi merger kedua partai konservatif. Alasan yang utama dari tindakan tersebut adalah Japan butuh suatu kestabilan politik untuk memulihkan ekonominya pasca Perang Korea. Kestabilan politik sangat dibutuhkan pada saat itu untuk mengembangkan kegiatan kapitalisnya. Terdapat sebuah slogan terkenal pada saat itu sebagai suatu tekanan untuk proses merger tersebut, *“abandon small difference and concentrate on larger similarities!”*

Dalam situs web LDP⁸ sendiri, proses merger kedua partai tersebut, dinyatakan sebagai: *“a unification of both parties would it be possible to establish a firm foundation for healthy parliemetary democracy, stabilize politics, and build a stong national economy and welfare system.*

Hal tersebut terbukti, setelah proses unifikasi LDP memenangkan pemilu secara mayoritas, dilanjutkan dengan terbentuknya untuk pertama kali pemerintahan Jepang yang konservatif di tahun 1955. Sejak itu LDP berhasil mempertahankan kemenangan secara mayoritas dalam pemilu hingga tahun 1993. Pada tahun 1993 terjadi berbagai skandal politik dan ekonomi dan juga akhir dari keajaiban ekonomi Jepang. LDP gagal mendapatkan kursi mayoritas tunggal walaupun masih sebagai partai terbesar di parlemen. Peristiwa tersebut mengakhiri 38 tahun pemerintahan di Jepang. Partai oposisi pada saat itu membentuk pemerintahan baru dibawah *the Liberal*

7 Kohno, M. (1997). *Japan’s Postwar Party Policy*

8 Dikutip dari laman <https://www.jimin.jp/>

Renewal Party. Pemerintahan dipimpin oleh Morihiro Hasokawa, ketua *Japan New Party* (JNP) sebagai Perdana Menteri.

Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, di tahun 1996 LDP kembali memegang kekuasaan sebagai partai mayoritas. Kembali LDP menjadi partai yang mendominasi dalam perpolitikan Jepang. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 1998 saat terbentuknya partai oposisi *Democratic Party (the Democratic Party of Japan/ DJP)*. Sejak itu partai oposisi itu selalu berhasil mengurangi dominasi LDP dalam peta perpolitikan di Jepang. Bahkan pada saat pemilu terakhir untuk majelis tinggi (*the House of Councillors*) tanggal 29 Juli 2007, DJP berhasil memperoleh kursi mayoritas di majelis tersebut.

Faksi-Faksi dalam LDP

LDP bukanlah organisasi tunggal tetapi merupakan kompetisi faksi-faksi. Sebenarnya, faksi partai merupakan kelompok-kelompok yang ada dalam Diet yang memiliki latar belakang yang sama yang diikat oleh kewajiban yang memiliki peran penting dalam budaya politik Jepang. Faksi umumnya terdapat dalam partai yang merupakan hasil dari merger atau penggabungan dua partai atau lebih. Faksi-faksi dalam partai bertujuan untuk mempertahankan ideologi atau nilai-nilai yang diegang oleh partai-partai sebelum merger. Faksionalisme dapat dilihat sebagai pemetaan aliran yang ada dalam partai tersebut. Dalam LDP pasti akan terlihat mana faksi yang liberal dan faksi mana yang demokrat. Perbedaan aliran pasti juga menimbulkan perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan keluarnya sebuah faksi dari suatu partai politik. Namun, hal itu agak sulit dilakukan mengingat belum tentu faksi tersebut dapat bertahan hidup dalam persaingan politik di Jepang. Hal ini juga berkaitan dengan pendanaan partai dan bagaimana menarik suara untuk suatu partai baru. Jika sebuah faksi tetap bertahan dalam suatu partai besar, maka paling tidak akan ada jaminan bahwa kepentingan mereka akan diakomodir atau setidaknya dapat masuk ke legislatif.

Selain itu, faksi-faksi yang ada dalam partai juga mengalami koalisi dengan faksi lainnya. Koalisi faksi yang mendominasi akan disebut sebagai kelompok *mainstream* sedangkan koalisi yang kecil atau lemah akan disebut sebagai *anti mainstream*. Hubungan antar koalisi ini ialah oposisi satu sama lain. Koalisi seperti ini berpengaruh

dalam perebutan kedudukan dalam partai sehingga juga memperngaruhi peraihan posisi dalam Diet dan kabinet.

Leaders of LDP

Selanjutnya akan di cantumkan nama-nama pemimpin LDP, beberapa diantara mereka juga pernah menjabat sebagai PM Jepang.

1. Ichiro Hatoyama (4 Mei 1956 – 14 Desember 1956)
2. Tanzan Ishibashi (14 Desember 1956 – 21 Maret 1957)
3. Nobusuke Kishi (21 Maret 1957 – 14 Juli 1960)
4. Hayato Ikeda (14 Juli 1960 – 1 Desember 1964)
5. Eisaku Sato (1 Desember 1964 – 5 Juli 1972)
6. Kakuei Tanaka (5 Juli 1972 – 4 Desember 1974)
7. Takeo Miki (4 Desember 1974 – 23 Desember 1976)
8. Takeo Fukuda (23 Desember 1976 – 1 Desember 1978)
9. Masayoshi Ohira (1 Desember 1978 – 12 Juni 1980)
10. Eiichi Nishimura (12 Juni 1980 – 15 Juli 1980)
11. Zenko Suzuki (15 Juli 1980 – 25 November 1982)
12. Yasuhiro Nakasone (25 November 1982 – 31 Oktober 1987)
13. Noboru Takeshita (31 Oktober 1987 – 2 Juni 1989)
14. Sosuke Uno (2 Juni 1989 – 8 Agustus 1989)
15. Toshiki Kaifu (8 Agustus 1989 – 30 Oktober 1991)
16. Kiichi Miyazawa (31 Oktober 1991 – 29 Juli 1993)
17. Yohei Kono (30 Juli 1993 – 30 September 1995)
18. Ryutaro Hashimoto (1 Oktober 1995 – 24 Juli 1998)
19. Keizo Obuchi (24 Juli 1998 – 5 April 2000)
20. Yoshiro Mori (5 April 2000 – 24 April 2001)
21. Junichiro Koizumi (24 April 2001 – 21 September 2006)
22. Shinzo Abe (21 September 2006 – 2007)

23.Yasuo Fukuda (23 September 2007 - Sekarang)⁹

Faktor-faktor yang membuat LDP dapat bertahan lama dalam pemerintahan Jepang

1. Pendukung

Sebuah partai atau pemimpin serta pemerintahan tidak akan mempunyai legalitas kekuasaan jika tidak ada pendukungnya. LDP mempunyai banyak pendukung yang berbasis di pedesaan. Para pendukung yang mayoritas dari kalangan petani konservatif tersebut merupakan para pendukung fanatis LDP yang dikenal loyal terhadap pemimpin mereka. Bahkan mereka bersedia untuk mencarikan apapun yang dibutuhkan oleh pemimpinnya. Dengan banyaknya pendukung fanatis yang berakar di desa-desa ini, partai LDP kemudian menjadi ancaman dan lawan yang berat bagi partai-partai oposisi lain, khususnya bagi partai DPJ (*Democratic Party of Japan*).

Selain dukungan dari petani konservatif di desa, partai LDP juga mempunyai pendukung dari kalangan pebisnis dan birokrat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya *Japan Incorporated*, yaitu hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara partai yang berkuasa (LDP), birokrat, dan pebisnis¹⁰. Hubungan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan partai LDP dalam bidang ekonomi, seperti mendukung ekonomi neoliberal.

2. Faksi (Habatsu)

LDP merupakan partai besar. Partai tersebut dibentuk oleh faksi-faksi (*habatsu*) yang sangat kuat dan saling bersaing dengan setiap pemimpin dari faksi tersebut bersikap sebagai oyabun bagi anggota-anggota fraksi. *Habatsu* di LDP terbagi menjadi sembilan bagian utama, antara lain¹¹:

- 1) *Seiwa Seisaku Kenkyuukai* (*Seiwa Political-analysis Council*) (*Faksi Machimura*). Dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Nobutaka Machimura. Ditemukan oleh Takeo Fukuda pada tahun 1962. Ini adalah fraksi pro ekonomi klasik dan konservatif. Mantan PM Jepang dan mantan pemimpin Partai Shinzo Abe berasal dari fraksi ini. Shintaro Abe (ayah Shinzo Abe) juga berasal dari fraksi ini, pernah menjabat sebagai

⁹ Dikutip dari laman <https://www.jimin.jp/>

¹⁰ *Suicune and The Pair of Heart*, "Perkembangan LDP dan DPJ", Rifuku no Monogatari, diakses dari <http://suicunesoul.blogspot.com/2008/10/perkembangan-ldp-dan-dpj.html> pada tanggal 27 November 2014 pukul 16.34

¹¹ Ho Kong-lim, "印尼語作文 : Partai Politik dan Pemilihan Umum di Jepang", 何江霖的博克, diakses dari <http://hokonglim.blogspot.com/2012/01/partai-politik-dan-pemilihan-umum-di.html?m=1> pada tanggal 27 November 2014 pukul 16.34

pemimpin fraksi 1986-1991. Mantan PM Junichiro Koizumi dan Yoshiro Mori juga pernah memimpin fraksi ini. Tahun 2004, fraksi ini menyusul fraksi Hashimoto dalam kekuatannya di Majelis Rendah, tetapi hal ini diatasi dengan 51 kursi di Majelis Rendah dan 23 kursi di Majelis Tinggi.

- 2) Heisei Kenkyuukai (Heisei Research Council) (Faksi Tsushima). Diketaui oleh Yuji Tsushima sejak September 2005. Sebelumnya dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto. Secara de facto, fraksi ini dipimpin oleh anggota majelis tinggi Mikio Aoki. Fraksi ini memiliki pengaruh yang kuat dalam birokrasi. Namun mantan PM Hashimoto dan fraksinya terkena skandal ketika fraksi telah mengambil uang dari Japan Dental Association. Hashimoto lepas dari jabatan pada tahun 2004, dan keluar dari dunia perpolitikan pada tahun yang sama. Fraksi ini memiliki 48 kursi di Majelis Rendah dan 29 di Majelis Tinggi.
- 3) Shisuikai (Commander Plan Association) (Faksi Ibuki). dipimpin oleh Bunmei Ibuki. Setelah tragedi bunuh diri dari salah satu anggota fraksi ini pada Agustus 2005, fraksi memiliki 27 kursi di Majelis Rendah dan 18 kursi di Majelis Tinggi.
- 4) Koochikai (Large Reservoir Association) (Faksi Koga). Dipimpin Makoto Koga, memiliki 32 kursi di Majelis Rendah dan 14 kursi di Majelis Tinggi. Sejarahanya, fraksi ini merupakan fraksi yang paling bergengsi, dengan banyaknya anggota ditarik dari kelas tinggi elite birokrasi.
- 5) Koochikai (Faksi Tanigaki). Dipimpin oleh Sadakazu Tanigaki. Sebelumnya fraksi ini dipimpin oleh Koichi Kato sampai tahun 2002 ketika Kato berhenti dari Diet dan terkena skandal dengan sekertaris pribadinya. Fraksi ini memiliki 12 kursi di Majelis Rendah dan 4 kursi di Majelis Tinggi.
- 6) Kinmirai Seiji Kenkyuukai (Research for Politics of the Near Future) (Faksi Yamasaki). Dipimpin oleh Taku Yamasakii, memiliki 24 kursi di Majelis Rendah dan 5 kursi Majelis Tinggi.
- 7) Bancho Seisaku Kenkyuujo (Bancho Policy-analysis Institute) (Faksi Komura). Dipimpin oleh Masahiko Komura, memiliki 12 kursi di Majelis Rendah dan 2 kursi di Majelis Tinggi.
- 8) Ikoukai (Isamu Hiroshi Committee) (Faksi Kono). Sebelumnya dipimpin oleh Yohei Kono, yang seorang pembicara dari House of Representatives, memiliki 9 kursi di Majelis Rendah dan satu kursi di Majelis Tinggi.
- 9) Atarashii Nami (New Wave) (Faksi Nikai). Dipimpin oleh Toshihiro Nikai. Fraksi ini adalah fraksi yang paling sayap-kanan di LDP, memiliki 4 kursi di Majelis Rendah dan 2 kursi di Majelis Tinggi. Selain itu ada 25 kursi fraksi yang tidak berafiliasi dan

17 kursi di Majelis Tinggi. Pemimpin fraksi biasanya politisi veteran LDP, tetapi tidak semua menduduki jabatan PM¹²

3. Koalisi

LDP mempunyai kemampuan yang baik dalam memilih partner koalisi yang tepat dan sesuai ketika mereka harus melakukan koalisi. Pada pemilihan tahun 2000, partai LDP mengalami penurunan drastis dalam perolehan kursi di parlemen. Rekan partai LDP adalah Partai Komeito Baru dan Partai Konservatif Baru.

4. Koenkai

Koenkai merupakan sebuah organisasi yang menjadi pendukung personal kandidat yang akan menduduki kursi pemerintahan dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap LDP¹³. Koenkai ini terbagi menjadi koenkai perkotaan dan koenkai di pedesaan dengan koenkai di pedesaan yang memiliki dukungan 70% lebih tinggi daripada koenkai yang ada di wilayah perkotaan¹⁴. Peranan koenkai dalam dukungannya terhadap keberlangsungan pemerintahan LDP adalah mobilisasi pemilih secara pragmatis dan hal tersebut dapat menopang kekuasaan partai LDP untuk jangka waktu yang sangat lama.

5. Seimu Chosakaicho

Seimu Chosakaicho merupakan badan yang berfungsi sebagai perumus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai yang diajukan di dalam parlemen¹⁵. Badan ini sering menyediakan jasa untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kelompok kepentingan dan pejabat terkait¹⁶. Terdapat pula *zoku-giin*, yaitu sebuah *policy-tribe* yang berfungsi untuk memikirkan dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh parlemen, khususnya yang dipimpin oleh LDP, agar sesuai dengan apa yang partai tersebut visikan. Keanggotaan *zoku-giin* dipilih melalui kerja kerasnya dalam perbendaharaan kebijakan, sehingga tertutup kemungkinan untuk anggota legislatif baru untuk menjadi bagian dari badan ini.

D. Kesimpulan

Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke II, Jepang mengalami proses demokratisasi yang cukup pesat. Pengalaman Jepang dengan sistem kepartaian sebelum Perang Dunia ke II,

12 Dikutip dari laman <https://www.jimin.jp/>

13 Ho Kong-lim, "印尼語作文：Partai Politik dan Pemilihan Umum di Jepang", 何江霖的博克,

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

membuat Jepang tidak kesulitan menjalankan sistem demokrasi parlementer pasca Perang Dunia ke II. Ini dibuktikan dengan bermuculannya partai-partai seperti partai liberal tahun 1945 , Partai Sosialis Jepang (Nihon Shakai-to), Partai Progresif Jepang (Nihon Shimpō-to), Partai Kooperasi Jepang (Nihon Kyōdō-to), Partai Komunis Jepang (Nihon Kyōsan-to) dan Partai Demokratik Rakyat (Kokumin Minshu-to) yang tergabung dari Partai Progresif Jepang menjadi Partai Demokrat Jepang (Nihon Minshu-to) dan kemudian bergabung dengan Partai Koperasi Rakyat untuk membentuk Partai Demokratik Rakyat . namun, Sesaat sebelum Jepang kembali kemerdekaannya, partai ini dibubarkan pada bulan Februari 1952 dan dengan cepat membentuk partai baru, Partai Reformasi (Kaishin-to), yang berkembang menjadi Partai Demokrat Jepang (Nihon Minshu-to) pada bulan November 1954.

Kemudian pada 15 November 1955 Liberal Democratic Party atau Jiyu Minshu To (lebih populer disebut LDP) terbentuk. Sebagai gabungan dua partai oposisi, Partai Liberal (Jiyu To) yang dipimpin oleh Shigeru Yoshida dan Partai Demokrat Jepang (Minsyu To) yang dipimpin oleh Ichiro Hatoyama. Keduanya merupakan partai konservatif sayap kanan yang melawan Partai Sosialis Jepang (Shakai To, Japan Socialist Party, yang pada akhirnya berganti nama dengan the *Social-Democratic Party/ SDP*) dan salah satu alasan terbentuknya LDP adalah sebagai reaksi dari pembentukan JSP.

Dalam perkembangan sistem kepartaian di Jepang LDP menjadi partai yang paling mendominasi. Sejak pemilu 1955 LDP selalu menang sampai tahun 1993 , namun ditahun 1993 terjadi berbagai skandal politik dan ekonomi dan juga sebagai akhir dari keajaiban ekonomi Jepang. LDP gagal mendapatkan kursi mayoritas tunggal walaupun masih sebagai partai terbesar di parlemen. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, di tahun 1996 LDP kembali memegang kekuasaan sebagai partai mayoritas. Namun sejak berdirinya partai oposisi yaitu DPJ pada tahun 1998 partai oposisi itu selalu berhasil mengurangi dominasi LDP dalam peta perpolitikan di Jepang. Bahkan pada saat pemilu terakhir untuk

majelis tinggi (the House of Councillors) tanggal 29 Juli 2007, DJP berhasil memperoleh kursi mayoritas di majelis tersebut. Meskipun begitu dominasi LDP begitu besar pada pepartaian di Jepang ada berapa hal yang melatar belakangi begitu dominannya LDP pada perpolitikan Jepang :

1. LDP mempunyai banyak pendukung terutama yang berbasis di pedesaan. Para pendukung yang mayoritas dari kalangan petani konservatif tersebut merupakan para pendukung fanatis LDP yang dikenal loyal terhadap pemimpin mereka. Selain dukungan dari petani konservatif di desa, partai LDP juga mempunyai pendukung dari kalangan pebisnis dan birokrat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya *Japan Incorporated*, yaitu hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara partai yang berkuasa (LDP), birokrat, dan pebisnis.
2. LDP merupakan partai besar dan dibentuk oleh faksi-faksi (*habatsu*) yang sangat kuat dan saling bersaing dengan setiap pemimpin dari faksi tersebut bersikap sebagai oyabun bagi anggota-anggota fraksi.
3. LDP mempunyai kemampuan yang baik dalam memilih partner koalisi yang tepat dan sesuai ketika mereka harus melakukan koalisi.
4. Koenkai merupakan sebuah organisasi yang menjadi pendukung personal kandidat yang akan menduduki kursi pemerintahan dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap LDP. Peranan koenkai dalam dukungannya terhadap keberlangsungan pemerintahan LDP adalah mobilisasi pemilih secara pragmatis dan hal tersebut dapat menopang kekuasaan partai LDP untuk jangka waktu yang sangat lama.
5. Dan terakhir LDP memiliki Seimu Chosakaicho yaitu badan yang berfungsi sebagai perumus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai yang diajukan di dalam parlemen. Badan ini sering menyediakan jasa untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kelompok kepentingan dan pejabat terkait.

E. Referensi

- Ho Kong-lim, “印尼語作文： *Partai Politik dan Pemilihan Umum di Jepang*”, 何江霖的博克, (diakses dari <http://hokonglim.blogspot.com/2012/01/partai-politik-dan-pemilihan-umum-di.html?m=1> pada tanggal 27 November 2014 pukul 16.34)
- KRAUSS, ELLIS S. AND ROBERT J. PEKKANEN : *The Rise and Fall of Japans Liberal Democratic Party*
- Gallagher, Michael & Paul Mitchell, *The Politics of Electoral System*. (Oxford: Oxford University Press, 2005)
- Suicune and The Pair of Heart, “Perkembangan LDP dan DPJ”, Rifuku no Monogatari, (diakses dari <http://suicunesoul.blogspot.com/2008/10/perkembangan-ldp-dan-dpj.html> pada tanggal 27 November 2014 pukul 16.34)
- Kohno, M. (1997). *Japan's Postwar Party Policy*
- Party, L. D. (n.d.). Before The Conservative Alliance. Diakses pada tanggal 2 Desember 2014 dari <https://www.jimin.jp/>